

**STRATEGI KERJASAMA DI BIDANG COUNTER TERRORISM MELALUI ASEAN
DEFENSE MINISTERS' MEETING PLUS DI TAHUN 2013 DALAM MENINGKATKAN
KEMAMPUAN PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA**

**COOPERATION IN COUNTER TERRORISM THROUGH ASEAN DEFENSE MINISTERS'
MEETING PLUS ON PERIOD 2013 TO INCREASE COUNTER TERRORISM ABILITY IN
INDONESIA**

Afifah Noor Khairani¹

Mayjen TNI (Purn) Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Bus, M.A²

Dr. Poppy Setyawati, S.Sos, M.Si³

(afifahnoorkhairani@gmail.com)

Abstrak - Menghadapi ancaman terorisme, maka dibutuhkan kecerdasan dan ketangguhan dari negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Usaha yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan kerjasama antar negara. Melalui ADMM-plus, langkah ini merupakan jalan yang tepat karena ADMM plus merupakan mekanisme kerjasama pertahanan dan keamanan guna mendukung CBM, stabilitas kawasan, pengembangan dan pembangunan di kawasan dengan melibatkan Negara ASEAN serta delapan negara sebagai mitra yakni Australia, Cina, Jepang, India, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer diperoleh melalui proses wawancara kepada pihak terkait dengan *counter terrorism* dan ADMM plus. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang meliputi: buku, jurnal, artikel dan dokumen yang terkait dengan kerjasama di bidang *counter terrorism* melalui ADMM plus. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa strategi yang digunakan pada kerjasama di bidang *counter terrorism* melalui ADMM plus di tahun 2013 dalam meningkatkan kemampuan penanggulangan terorisme di Indonesia adalah dengan cara melakukan *joint training* (latihan bersama) berisikan materi *table top exercise* dan *practical exercise*, memiliki tujuan untuk memberikan wawasan mengenai tantangan dan prioritas keamanan di regional, pengembangan kemampuan angkatan bersenjata milik negara dalam hal penanggulangan terorisme, dan mendukung proses penegakan hukum atau usaha lain yang dilakukan oleh institusi pemerintah. Bagi Indonesia, kerjasama ini merupakan strategi yang dilakukan untuk

¹ Mahasiswa pasca sarjana Universitas Pertahanan, prodi Diplomasi Pertahanan cohort 2, tahun ajar 2015-2016

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

mencapai kepentingan nasionalnya. Untuk mendukung kerjasama ini, digunakan pemanfaatan sarana militer mulai dari peralatan (alutsista), teknologi, dan juga kemampuan personel yang dimiliki masing-masing negara anggota.

Kata kunci : strategi, kerjasama, terorisme, counter terrorism, ADMM plus, kepentingan nasional

Abstract - Facing the threat of terrorism, it takes intelligence and toughness of the state to maintain defense and security. The effort that can be done to improve the cooperation between countries. ADMM-Plus is the right path for ASEAN to againts the terrorist threat, because ADMM plus is a defense and security cooperation mechanism supporting CBM, regional stability, development and construction in the area involving ASEAN member states and eight countries : Australia, China, Japan, India, New Zealand, South Korea, Russia and the United States. This research uses qualitative primary data through interviews into interested parties with counter terrorism and ADMM plus. In addition, this research also is supported by secondary data includes: books, journals, articles and related documents to counter terrorism cooperation through ADMM plus. The results explains that the strategy used on counter terrorism cooperation through ADMM plus in period 2013 to increase counter terrorism ability in Indonesia is done by conducting joint training (training together) with the material in which table top exercise and practical exercise, which has the aim to provide insight into the challenges and priorities of security in the region , the development of the ability for the arm forces belong to the state in terms of counter-terrorism, and supporting law enforcement agencies or other effort by government institutions. For Indonesia, this cooperation is a strategy to achieve the national interest. To support this cooperation, government use means by utilizing the facilities from military equipment (defense equipment), technology, and also the personnel ability of each member state.

Keywords: strategy, cooperation, terrorism, counter terrorism, ADMM plus, national interest

Pendahuluan

Krisis ekonomi yang terjadi mulai tahun 1997 di kawasan Asia Tenggara juga diikuti oleh krisis politik dimana banyak sekali muncul gerakan-gerakan yang menentang pemerintah, terutama gerakan separatis dan demo anti-pemerintah AS, dan juga mengalami masa-masa krisis ekonomi yang menyebabkan kawasan ini menjadi tidak stabil. Beranjak setelah

peristiwa tersebut, dunia dikejutkan dengan peristiwa penyerangan yang menghancurkan gedung World Trade Center di New York pada tanggal 11 September 2001. Menurut data intelijen, pihak yang bertanggung jawab atas kejadian 9 September 2001 adalah Al-Qaeda, yang merupakan kelompok terorisme yang berpaham islam radikal (Soesilowati, 2011:235). Sejarah berdirinya Al-Qaeda dapat ditelusuri mulai dari perang

Afghanistan melawan invansi uni Soviet pada tahun 1979 sampai 1989, dimana Al-Qaeda bermula dari organisasi yang bernama MAK (Maktab al-Khidamat) yang didirikan oleh Sheikh Abdullah Azam dan Osama bin Laden pada tahun 1984 (Golose, 2010:20). Akibat kekalahan tentara Soviet, maka Al-Qaeda muncul sebagai salah satu kelompok yang berjuang untuk memperjuangkan ideologi islam, melalui *mujahidin* (Gunaratna, 2002:1). Pasca terjadinya serangan 11 September 2001, AS mengumumkan perang terhadap terorisme. Sebagai langkah awal AS memerangi Al-Qaeda adalah dengan melakukan penyerangan militer ke wilayah Afghanistan pada tanggal 7 Oktober 2001. Perang melawan terorisme ini berubah menjadi serangan ambisius yang diwujudkan dengan invansi ke Irak, dengan tuduhan bahwa Irak telah mengembangkan senjata pemusnah massal (Golose, 2010:21).

Banyaknya kelompok gerakan Islam radikal dan militan di kawasan Asia Tenggara dan kelompok gerakan tersebut merupakan mitra dari jaringan teroris Al-Qaeda, hal inilah yang membuat AS menjadikan Asia Tenggara sebagai *second front* atau daerah perang kedua bagi AS

dalam memerangi aksi teror (Sinambela, 2014:60). Letak strategis yang dimiliki oleh kawasan Asia Tenggara memiliki keuntungan maupun ancaman tersendiri. Bagi ASEAN, terjaganya keamanan dan kestabilan di kawasan menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi, karena hal tersebut merupakan "*conditio sine qua non*" yakni prasyarat bagi kelanjutan pembangunan ekonomi dan kemakmuran di kawasan (Kemlu, 2015:8). Oleh karena itu diperlukan suatu cara agar masalah ini dapat diselesaikan, yakni dengan mengedepankan diplomasi sebagai *soft power* yang dimiliki oleh negara dalam berkompromi dengan negara lain untuk saling membantu menangani ancaman terorisme yang mengganggu kestabilan di kawasan. Sehingga, diplomasi telah dilakukan oleh negara untuk melakukan kerjasama dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan (Griffiths, O'Callaghan, & Roach, 2008:80).

Munculnya isu terorisme di kawasan Asia Tenggara ini sangat mempengaruhi hubungan antar Negara yang ada di Asia Tenggara (Salim, 2012:9). Seperti yang dikatakan oleh Bowman bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu

melawan terorisme internasional sendirian (Kurniawati, 2012:4). Terorisme sebagai salah satu jenis dari *Activities of Transnational or Criminal Organizations*, merupakan kejahatan yang ditakuti karena ancaman dan akibat yang ditimbulkan cukup luas (Sinambela, 2014:17). Berbagai upaya telah dilakukan ASEAN sebagai bentuk respon organisasi kawasan di Asia Tenggara dalam memberantas terorisme. Terorisme yang merupakan kejahatan lintas batas membutuhkan kerjasama antar negara, maka Negara-negara ASEAN yang telah bergabung membuat kolaborasi kerjasama pertahanan, maka terbentuklah ADMM (*ASEAN Defense Ministers Meeting*) yang pada perkembangannya meluas menjadi kerjasama yang melibatkan negara-negara partner atau mitra wicara bagi ASEAN yang dikenal sebagai ADMM-plus. Tujuan diselenggarakan ADMM-plus dalam bidang *counter terrorism* pada tahun 2013 ini adalah untuk mempromosikan dan memperkuat kerjasama yang telah terjalin antar militer yang tergabung dalam ADMM Plus (Akbar, 2013:7).

Kendala yang dihadapi oleh kawasan berasal dari masih kakunya penerapan norma atau prinsip yang mendasari

kerjasama antar Negara ASEAN yakni *ASEAN way*. Prinsip *non-interference* yang terkandung dalam *ASEAN way* ini bisa dikatakan sebagai salah satu faktor penghambat gerak ASEAN dalam mengimplementasikan kerjasama penanggulangan terorisme (Yuniarti, 2010:3). Hal ini yang membuat beberapa mekanisme kerjasama yang ada di ASEAN berjalan sedikit lambat. Keterlibatan Indonesia baik di kawasan ASEAN maupun global dalam rangka menjaga kestabilan, keamanan dan perdamaian khususnya dalam isu terorisme merupakan implementasi langsung dari strategi Indonesia melalui diplomasi pertahanan itu sendiri yang diimplementasikan dengan kerjasama pertahanan. Namun masih terdapatnya berbagai kendala yang dihadapi tersebut, menjadikan proses kerjasama di bidang *counter terrorism* melalui ADMM-plus ini dalam meningkatkan kemampuan penanggulangan terorisme di Indonesia masih belum berjalan maksimal

Tinjauan Teoritis

Teori Strategi

Pemaknaan awal mengenai strategi bersumber dari perang, yakni cara tentang

mencapai kemenangan dikhususkan untuk menemukan sumber daya yang dimiliki bangsa berupa manusia dan material, sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk memaksimalkan total efektifitas bangsa didalam perang tersebut (Mahnken & Maiolo, 2008:13). Oleh karena itu, pada awalnya domain dari strategi akan selalu berkaitan dengan militer, perang dan cara bagaimana menggunakan hard power (Mahnken & Maiolo, 2008:13). Kini pemaknaan strategi tidak hanya digunakan dalam perang ataupun militer saja, namun kini telah digunakan oleh kalangan akademis yang cenderung memaknai strategi sebagai penyusunan rencana-rencana perumusan kebijakan (Hart, 1991:320).

Pada Penelitian ini, menggunakan teori strategi yang diungkapkan oleh Cerami dan Halcomb. Secara universal, strategi menunjukkan adanya keterkaitan antara tiga unsur elemen, yakni *Ends* yaitu sasaran atau tujuan yang ingin dicapai, *Means* yaitu sarana atau sumber daya kekuatan yang dimiliki untuk mengejar tujuan dan sasaran tersebut, dan *Ways* yaitu bagaimana cara atau metode untuk mencapai

tujuan dengan mengorganisasi dan menggunakan sumber daya tersebut (Cerami & Halcomb, 2001:11).

Secara matematis, rumus dari strategi adalah sebagai berikut :

$$S = E + W + M$$

dimana :

S (Strategy) = Strategi

E (Ends) = Tujuan yang sudah ditentukan dalam kebijakan

W (Ways) = Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan

M (Means) = Sumber-sumber, sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan.

Dalam konteks Negara, strategi adalah kerja spesifik diantara instrumen kekuasaan (politik, diplomatik, ekonomi, militer, dan informasi) untuk mencapai tujuan politik negara dalam kerjasama atau persaingan dengan aktor-aktor lain untuk mengejar tujuan mereka sekalipun kadang bertentangan (Jeblonsky, 1995:10). Dalam tataran Negara, strategi adalah cara untuk mengembangkan dan menggunakan sumber daya nasional sesuai dengan

pedoman kebijakan untuk menciptakan, memajukan dan melindungi kepentingan nasional (Novitasari, 2015:15).

Dengan pemaknaan mengenai strategi, maka strategi pertahanan negara diselenggarakan melalui segala usaha dan kebijakan untuk membangun dan membina kemampuan serta menanggulangi berbagai ancaman. Strategi pertahanan ini diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional (Kemhan, Doktrin Pertahanan Negara, 2014:67). Strategi pertahanan negara dirumuskan dengan beberapa pertimbangan yang mendasar. Strategi pertahanan negara merumuskan tujuan, sasaran strategis, cara, serta sarana yang digunakan untuk terwujudnya kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang tangguh, efektif, dan berdaya tangkal tinggi (Kemhan, Strategi Pertahanan Negara, 2014:46).

Konsep Diplomasi Pertahanan

Begitu luasnya konsep diplomasi pertahanan, ditambah belum adanya teori yang *absolute* dalam menjelaskan diplomasi pertahanan, seringkali menimbulkan kebingungan dan kerancuan antara diplomasi dalam arti luas dengan diplomasi

pertahanan secara khusus. Perihal kerancuan secara definitif diantara ke dua konsep tersebut tidak hanya disebabkan adanya kesamaan istilah diplomasi namun juga secara fungsional dan cakupannya (Steiner, 2004:493-509). Diplomasi pertahanan merupakan keterpaduan antara dua instansi dan disebut pula kerjasama saling menguntungkan antara diplomasi dan pertahanan (*symbiosis between diplomacy and defense*) dengan cara meningkatkan kerjasama yakni memadukannya dengan masyarakat internasional (Supriyatno, 2014:166). Diplomasi pertahanan merupakan konsep yang dicetuskan oleh Inggris melalui *Strategic Defence Review* pada tahun 1998, yang ditujukan untuk mengintegrasikan instrumen militer dan diplomatik, terkait pencegahan konflik dan mengelola krisis (Corcoran, 2003:37). Istilah diplomasi pertahanan yang digunakan Inggris ini dijelaskan sebagai salah satu kebijakannya yang bertujuan untuk menanamkan pengaruh melalui tindakan-tindakan yang bersifat *low-cost* sebagai salah satu upaya memperkuat kemampuan militer dan teknologinya (Mulloy, 2007:5). Diplomasi pertahanan diselenggarakan dengan

mengkombinasikan prinsip dasar antara kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri yang ada (Hidayat, 2014:31).

Dalam penelitian ini, mengacu pada konsep diplomasi pertahanan yang dikemukakan oleh Anwar bahwa aplikasi dari diplomasi pertahanan di lapangan memiliki 4 bentuk yakni *talks*, *defense cooperation activities*, *peace keeping operation / peace mission*, dan penempatan atase pertahanan (Anwar, 2014:85). Diplomasi pertahanan yang diselenggarakan melalui *talks* (pembicaraan) dilakukan oleh para pejabat Kemhan (*ministers level*) dan TNI dalam forum atau pertemuan resmi dengan agenda pembicaraan yang sudah disepakati bersama, baik secara forum bilateral maupun forum multilateral, berupa *exchange view* (tukar pandangan), pembicaraan dokumen perjanjian, dan pembicaraan tingkat implementatif (pembicaraan tingkat operasional) (Anwar, 2014:87-88). Diplomasi pertahanan yang diaplikasikan kedalam bentuk *defense cooperation activities* (kegiatan kerjasama pertahanan), dilakukan oleh instansi Kemhan dan TNI baik secara individual maupun unit-unit operasional dengan negara lain, baik secara bilateral maupun

multilateral (Anwar, 2014:88). Diplomasi pertahanan juga diimplementasikan untuk *peace mission* (misi perdamaian), yakni dilakukan oleh pejabat atau perwira Kemhan atau TNI baik secara individual maupun kontingen dalam tugas-tugas misi perdamaian, contohnya sebagai staf di United Nation Department of Peace Keeping Operation (Anwar, 2014 : 89-90). Penempatan atase pertahanan di berbagai negara juga merupakan salah satu implementasi dari diplomasi pertahanan, sebagai wakil representasi Indonesia ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pertahanan di negara dimana atase pertahanan berada.

Konsep Kerjasama Pertahanan

Kerjasama pertahanan dapat dikonotasikan sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan di bidang pertahanan. Kerjasama pertahanan sebenarnya bagian dari diplomasi pertahanan (*defense diplomacy*) yaitu bagian dari diplomasi yang berkaitan erat dengan domain pertahanan, termasuk semua dukungan untuk kepentingan pertahanan (Mangindaan, 2013). Menurut Slaughter, suatu negara dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif apabila adanya kerjasama

dengan negara lain secara aktif. Kemampuan suatu negara menjalin kerjasama merupakan bentuk baru kedaulatan negara dimana negara secara efektif dan partisipatif dalam bekerjasama di forum dan jaringan internasional (Slaughter, 2012:9). Dalam konteks internasional, kerjasama pertahanan dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu kerjasama bilateral dan multilateral. Menurut Slaughter, kerjasama pertahanan meliputi beberapa hal yakni *joint charter* antara militer atau sipil dalam sektor kapabilitas, penyatuan suplai kapabilitas militer yang berguna dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan, pengadaan bersama dan pembagian kapabilitas militer, kerjasama operasional terintegrasi, spesialisasi peran dan tugas dalam konteks kerjasama struktural permanen (Slaughter, 2012:10).

Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai upaya negara untuk mengejar power dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan

memelihara kontrol atas suatu negara terhadap negara lain. Hal ini dijelaskan oleh Hans J. Morgenthau didalam "*The Concept of Interest defined in Terms of power*", bahwa konsep Kepentingan Nasional (*Interest*) dapat didefinisikan dengan istilah "power" (Jemadu, 2008:68). Adapun hubungan antara strategi diplomasi dengan kepentingan nasional sangatlah erat. Morgenthau berpendapat bahwa strategi diplomasi yang dijalankan berdasarkan kepada kepentingan nasional yang dimiliki. Kepentingan nasional tersebut digunakan untuk mengejar "power" yang bisa digunakan untuk membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Kepentingan juga didasari akan suatu 'power' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Dapat diartikan bahwa kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain, sehingga pemimpin negara menurunkan kebijakan tertentu terhadap

negara lain melalui kerjasama ataupun konflik (Jackson & Sorensen, 2009:89).

Penanggulangan Terorisme

Istilah terorisme, teroris, dan teror itu sendiri berasal dari bahasa Latin *terror*, yang diturunkan dari kata kerja *terrere*, yang artinya menakuti-nakuti (*to frighten*) (Fatlolon, 2016:58). Secara etimologis “*terror*” berarti suatu keadaan ketakutan yang mendalam. Berdasarkan pengertian etimologis inilah maka istilah terorisme dapat dipahami sebagai penggunaan sistematis dari ketakutan sebagai sebuah sarana kekerasan dan paksaan, termasuk upaya menciptakan atmosfer ketakutan dan kekerasan seperti sebuah *reign of terror* (Fatlolon, 2016:59). Dengan bantuan dari negara major dalam hal penanggulangan terorisme, negara-negara anggota ASEAN mampu meningkatkan kapasitas nasional mereka untuk memerang terorisme yang terjadi di kawasan maupun di dalam negerinya sendiri. Bantuan asing dari negara-negara besar bertujuan untuk menjembatani kesenjangan anggaran dalam kampanye melawan terorisme. dengan adanya dukungan dari negara-negara besar, menjadikan negara-negara anggota ASEAN

dapat belajar berbagai praktik dalam penanggulangan terorisme yang dapat dijadikan sebagai acuan (Banlaoi, 2009:107). Berubahnya pola aksi terorisme, maka strategi dalam penanggulangan terorisme juga harus dimodifikasi seefektif dan seefisien mungkin. Strategi yang digunakan haruslah lentur agar dapat segera beradaptasi terhadap perubahan strategi yang diterapkan kelompok teroris. Menurut Forest, strategi penanggulangan terorisme adalah penggunaan semua potensi kekuatan bangsa yang ada dalam upaya mereduksi keberadaan dan kemampuan kelompok teroris ketika berkomunikasi dan melaksanakan rencana mereka dan memisahkan mereka dari sekutunya (Forest, 2007, hal. 4).

Metode Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Basrowi & Suwandi, 2008:21). Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang

langsung dapat dilapangan, antara lain tentang data-data maupun informasi yang diperlukan dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan (Sugiarto, 2004:40). Data primer dari penelitian ini adalah pendapat akademisi, praktisi maupun pengambilan kebijakan yakni Menteri Pertahanan periode 2009-2014 (Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro M.Sc, M.A, Ph.D), Analis Madya Bidang Doktrin, Direktorat Kebijakan Strategi Pertahanan, Subdit Strategi Pertahanan (Letkol Romson Sianturi), Analis Madya Kasubdit Multilateral, Direktorat Kerjasama Internasional (Kol. Kav. Okta Ramsi, S.IP, M.Sc), Kepala Sub-Bidang Kerjasama Multilateral, Deputi Kerjasama Internasional (Kol. Inf. Ronny, S.AP, M.M), Kepala Sekolah Tinggi Intelijen Negara (Brigjen TNI Dr.rer.pol Rodon Pedrason, M.A), dan Peneliti Madya P2p LIPI (Dr. Riefqi Muna, M.DefStu, PhD). Data yang dikumpulkan adalah tentang kerjasama di bidang *counter-terrorism* melalui ADMM-plus pada tahun 2013 dalam meningkatkan kemampuan penanggulangan terorisme di Indonesia. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang di

publikasikan (Ruslan, 2010:138). Data sekunder penelitian diperoleh dari studi kepustakaan yang di dalamnya terdiri dari buku, hasil penelitian, jurnal, surat kabar, laporan hasil seminar, penelitian tesis, majalah, media baik cetak maupun *online* yang membahas mengenai diplomasi pertahanan Indonesia, kerjasama pertahanan dan kaitannya dengan penanggulangan terorisme di Asia Tenggara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan teknik *purposive* dan studi pustaka. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin. Terdapat tiga langkah besar dalam melakukan analisis data yakni *open coding*, *axial coding*, dan *selection coding* (Basrowi & Suwandi, 2008:206-207). Teknik pemeriksaan keabsahaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yakni memungkinkan peneliti untuk memeriksa kembali temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. (Moleong, 2005:331-332).

Pembahasan

Strategi Kerjasama Di Bidang Counter Terrorism Melalui ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus Pada Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Kemampuan Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Semenjak adanya isu mengenai perang terhadap terorisme secara global, kesoliditas yang dimiliki oleh ASEAN ini diuji sebagai wadah kerjasama politik. Karena adanya perbedaan kepentingan nasional tiap negara, perjalanan sejarah yang dimiliki tiap negara, pandangan politik yang dimiliki pemimpin negara serta latar belakang masyarakatnya menjadikan kesolidan ASEAN diuji. Dalam menjalani sebuah kerjasama, dibutuhkan strategi tertentu agar kerjasama tersebut dapat berjalan lancar bahkan mempererat hubungan antar anggota yang terikat dengan kerjasama tersebut. Begitu juga dengan penanggulan terorisme di kawasan ASEAN, dibutuhkan strategi yang tepat untuk menyatukan keberaneka ragam pandangan dan kebijakan tiap negara dalam melakukan penanggulan terorisme.

Berdasarkan Teori Strategi yang dikemukakan oleh Cerami & Halcomb (2001:11), bahwa strategi terdiri dari tiga

unsur elemen yang saling terkait, yakni *Ends* yakni sasaran atau tujuan yang ingin dicapai, *Means* yakni sarana atau sumber daya kekuatan yang dimiliki untuk mengejar tujuan dan sasaran tersebut, dan *Ways* yaitu bagaimana cara atau metode untuk mencapai tujuan dengan mengorganisasi dan menggunakan sumber daya tersebut. Strategi penanggulangan terorisme yang dibuat oleh Indonesia tentu saja juga sejalan dengan strategi pertahanan negara yang dimiliki, yakni dengan melakukan segala usaha dan kebijakan untuk membangun dan membina kemampuan serta menanggulangi berbagai ancaman sesuai paham dan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai. Dari semua yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa cara atau metode yang telah dilakukan oleh Indonesia di bidang *counter terrorism* dalam payung ADMM plus ini adalah dengan melakukan *joint training* (latihan bersama) dengan negara anggota ASEAN dan 8 negara major lainnya yang tergabung dalam ADMM plus pada periode 2013 lalu. Latihan bersama itu diimplementasikan dengan melakukan *table top exercise* dan *practical exercise*. Materi dari *table top*

exercise berisi mengenai para peserta melakukan tukar menukar informasi dan pengetahuan agar terjadi kesepahaman mengenai bahaya terorisme, prioritas dan kemampuan penanggulangan terorisme, dan materi dari *practical exercise* dimana para peserta saling menunjukkan kemampuan di lapangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep dari strategi pertahanan negara Indonesia, yakni melalui ADMM plus ini, Indonesia melakukan kerjasama internasional di bidang pertahanan, salah satunya dilakukan dengan cara kerjasama di bidang *counter terrorism*. Sesuai dengan strategi pertahanan negara dalam Buku Putih Pertahanan, bahwa Indonesia menggunakan seluruh kekuatan milik negara baik yang bersifat militer maupun non-militer. Dalam Buku Putih Pertahanan dikatakan bahwa salah satu cara yang dilakukan Indonesia dalam melakukan strategi pertahanan adalah dengan meningkatkan kerjasama internasional untuk mewujudkan wilayah yang damai dan stabil serta mencapai perdamaian dunia yang abadi yang berdasarkan persamaan hak dan kedudukan, menghargai kedaulatan tiap negara, serta tidak saling

mengintervensi terhadap urusan dalam negeri masing-masing negara.

Tujuan dari adanya kerjasama di bidang *counter terrorism* melalui ADMM plus ini bertujuan untuk untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara, menjaga kestabilan kawasan melihat kawasan regional yang senantiasa berubah. Bagi Indonesia, tujuan dari keikutsertaan dalam kerjasama ini adalah untuk mencapai kepentingan nasional yang dimiliki yakni untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa, dikarenakan ancaman terorisme semakin tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Menteri Pertahanan RI ke 23 periode 2009-2014 (Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro M.Sc, M.A, Ph.D) bahwa keterlibatan Indonesia dalam kerjasama penanggulangan terorisme adalah untuk mencapai kepentingan nasional yakni ikut melaksanakan perdamaian dunia. Tujuan Indonesia untuk tetap terlibat dalam perdamaian dunia juga berkaitan dengan usaha Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dunia atas komitmennya dalam memerangi tindak terorisme. Dengan melakukan berbagai cara, terutama dengan

melakukan kerjasama dengan negara lain, Indonesia berharap tujuan tersebut akan tercapai.

Indonesia ingin menunjukkan *image* atau citra bahwa Indonesia terus berkomitmen teguh dalam memberantas terorisme dengan kemampuan personel dan *military equipment* yang dimiliki dalam penanggulangan terorisme. Semua tujuan tersebut akan terhubung satu sama lainnya, dan pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan keikutsertaannya dalam kerjasama di bidang *counter terrorism* melalui ADMM plus ini adalah untuk meningkatkan kemampuan penanggulangan terorisme di dalam negeri. Hal tersebut telah diungkapkan oleh Analis Madya Bidang Doktrin Direktorat Kerjasama Kebijakan Strategi, Subdit Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan (Letkol Romson Sianturi) bahwa tujuan lainnya Indonesia ikut terlibat dalam kerjasama penanggulangan terorisme itu adalah untuk mendapatkan pengakuan dari dunia bahwa Indonesia selalu berkomitmen untuk terus menjaga perdamaian dan keamanan serta stabilitasan kawasan. Aksi terorisme yang terjadi di kawasan secara tidak langsung

memberikan dampak yang negatif terhadap keadaan kawasan, sehingga Indonesia pun waspada akan efek dari aksi terorisme, yang menyebabkan Indonesia selalu aktif dalam segala kerjasama apapun yang tujuannya untuk menjaga stabilitas kawasan, salah satunya adalah kerjasama penanggulangan terorisme.

Bukti konkrit kerjasama dalam penanggulangan terorisme ini adalah dengan diimplementasikan kerjasama melalui Expert Working Group (EWG) pada tahun 2013 lalu dimana salah satu fokusnya adalah membahas mengenai penanggulangan terorisme. EWG on CTX pertama yang dilakukan di Sentul dengan Indonesia dan AS sebagai *focal pointnya*. Dalam EWG ini, kerjasama yang dilakukan adalah dengan melakukan *joint training* (latihan bersama) yang terdiri dari *Table Top Exercise* (TTX) dan *Practical Exercise* (PE), serta *sharing information intelligent data* mengenai kelompok terorisme. Berdasarkan masukan yang diberikan dari ADMM plus mengenai bagaimana mekanisme yang harus dilakukan dalam membuat kerjasama untuk penanggulangan terorisme di dalam negeri, hal tersebut telah memberikan arahan

kepada institusi yang ada ketika akan melakukan kerjasama. Sehingga di dalam negeri sendiri, penanggulangan terorisme dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan militer dan non militer, dimana militer melibatkan institusi negara yang memegang tanggung jawab terhadap penanggulangan dan penanganan terorisme seperti Detasemen C Gegana Brimob, Densus 88 (Polri), Desk Anti Teror, BNPT, TNI (AD, AU, Marinir AL), Babinsa, dan BIN, dan kerjasama dengan dilakukan secara non-militer, strategi yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal penanggulangan terorisme yakni dengan melibatkan peran masyarakat yakni dengan adanya program deradikalisasi, disengagement, dan inkapasitasi

Ruang lingkup kerjasama di bidang counter terrorism melalui ADMM plus yang sudah terjadi adalah latihan bersama dalam penanggulangan terorisme pada tahun 2013 (*joint training on counter terrorism exercise*) dalam bingkai EWG. Hal ini didasari oleh pendapat dari Kepala Sekolah Tinggi Intelijen Negara (Brigjen TNI Dr.rer.pol Rodon Pedrason, M.A) dan Peneliti Madya P2P LIPI (Dr. Riefqi Muna, M.DefStu, PhD) yang mengatakan bahwa

kerjasama di bidang *counter terrorism* melalui ADMM plus dilakukan dengan latihan bersama, sedangkan deradikalisasi bukanlah bentuk kerjasama penanggulangan terorisme melalui ADMM plus dikarenakan deradikalisasi merupakan program kerja pemerintah Indonesia untuk di dalam negerinya sendiri. ADMM sendiri merupakan forum diskusi tingkat menteri dimana isu-isu yang diusulkan dan diharapkan yang menghasilkan kerjasama harus disiskusikan terlebih dahulu dalam EWG. Setelah isu tersebut disetujui, maka akan diangkat ke tingkat ADSOM-plus. Setelah isu tersebut disetujui, maka kemudian ada kerjasama lanjutan, baik kerjasama dalam bentuk latihan maupun kerjasama lainnya. Dalam latihan bersama melalui payung ADMM plus ini, latihan dilakukan oleh Indonesia beserta 9 negara Asia Tenggara lainnya dan 8 negara *external power* yang telah menjadi mitra wicara ASEAN, melakukan latihan bersama dengan dua materi yakni mengenai *Table Top Exercise* dan *Practical Exercise*.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Menteri Pertahanan RI ke 23 periode 2009-2014 (Ir. Purnomo Yusgiantoro M.Sc, M.A, Ph.D) pada wawancara 13 Oktober 2016 bahwa

strategi yang dilakukan oleh Indonesia dalam kerjasama di bidang *counter terrorism* dengan melakukan latihan bersama dengan materi yang berisikan tentang *class exercise (table top exercise)* yakni pemberian materi pengetahuan dan *field exercise* yakni mengimplementasikan materi yang sudah di dapat di *class exercise* di lapangan. Penjelasan tersebut juga dipertegas dengan pernyataan dari Kepala Sub-Bidang Kerjasama Multilateral, Bidang Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisisme (Kol. Inf. Ronny, S.AP, M.M) bahwa cara yang digunakan oleh Indonesia dalam strategi *counter terrorism* adalah dengan melakukan kerjasama melalui mekanisme *Expert working group*, dimana Indonesia dan AS pada kerjasama pertama kali itu menjadi *focal point* dalam memimpin latihan *counter terrorism* yang telah dilakukan di Sentul, Bogor. Materi latihan yang dalam *joint training* ini adalah *Table top exercise* dan *practical exercise*. *Table top exercise* merupakan grup diskusi berskala multinasional dimana didalamnya membahas mengenai isu ancaman terorisme, yang diikuti oleh 70 partisipan dari 17-18 negara anggota ADMM plus ini.

TTC menggaris bawahi kegiatan utama sebagai diskusi yang mampu memberikan keputusan strategis hingga taktik eksekusinya. Pada hari pertama dalam TTX akan dipresentasikan mengenai senjata kimia, biologi, radioaktif serta nuklir (CBRN: *chemical, biological, radioactive and nuclear*), dan beberapa jenis senjata konvensional lainnya. Pemberian pemahaman mengenai senjata ini wajib diketahui oleh para personel karena senjata ini tergolong pada "*weapons of mass destruction*".

Hal tersebut telah memberikan pengetahuan terhadap personel agar mampu menilai senjata yang berbahaya. Kegiatan selanjutnya setelah penilaian terhadap senjata yang berbahaya, adalah peserta dibagi beberapa grup untuk melakukan diskusi, dimana peserta tidak memakai atribut sebagai perwakilan individual ataupun negara namun lebih kepada diskusi bebas. Di tiap grup wajib mengidentifikasi dan menilai tingkatan bahaya akan jenis bahaya besar lainnya yang dihadapi oleh kawasan regional. Contohnya pada grup satu menempatkan bahaya terorisme di tingkat pertama, dan dibandingkan dengan tingkat bahaya yang

dimiliki oleh bencana alam. Setelah mampu menilai tingkatan bahaya, maka setiap grup akan membuat scenario penyelesaian, baik scenario utama maupun skenario lainnya sebagai cadangan, hal ini dikenal sebagai “*the two and a half threat scenarios*”. Latihan bersama mengenai penanggulangan terorisme dalam payung ADMM Plus ini didasari oleh kesadaran bersama dimana aksi terorisme saat ini oleh dunia internasional sudah dianggap musuh bersama karena dampaknya dapat menimbulkan bencana bagi kemanusiaan. Serangan teroris bukan hanya merupakan tindakan kriminal biasa akan tetapi merupakan ancaman potensial yang dapat membahayakan kelangsungan hidup negara. Pada latihan bersama ini, peserta yang menghadiri TTX akan melanjutkan latihan di lapangan yakni *Practical exercise*. Pada *practical exercise*, para peserta diperkenalkan secara umum mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh alat peledak (*Improvised Explosive Device/IED*), dan dalam latihan ini para peserta saling berbagi mengenai praktik terbaik tentang berbagai prosedur anti terorisme. PE ini dilaksanakan berdasarkan skenario yang telah dibuat dalam TTX sebelumnya yang

didalamnya harus mengandung asas perlindungan masyarakat sipil. Dalam PE ini, para peserta dari 18 negara menunjukkan keterampilannya dengan melakukan demonstrasi pembebasan sandera di darat ataupun di laut.

Alat *Counter-Improvised Explosive Device (C-IED)* yang dimiliki oleh AS *Army Pacific* telah dipakai dalam latihan ini dan memberikan manfaat yakni pembekalan materi secara singkat mengenai intelijen yang telah dilakukan selama dua hari dan latihan ini telah memberikan sosialisasi awal tentang kesadaran C-IED, serta pelajaran yang dapat diambil sebagai rujukan pada kasus terorisme di Irak dan Afghanistan. Ada dua belas negara anggota ADMM-Plus yang telah memberikan kontribusi ke bagian PE dari CTX ini yakni Australia, Brunei, China, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam. Banyak negara yang tertarik untuk menerima pelatihan lanjutan pada C-IED, dan telah mendiskusikan mengenai mekanisme selanjutnya agar pelatihan tersebut dapat difollow-up. Pada latihan yang ada di PE, setiap grup menerima pesan singkat, dan tiap anggota wajib

mempresentasikan taktik yang dimiliki negaranya, teknik dan taktik (*Techniques and Procedures/TTPs*), dan Program Aksi (*Courses of Action/COA*).

Kerjasama penanggulangan terorisme yang memiliki tujuan tertentu, tentu saja juga memiliki sarana dan sumber daya yang dipakai dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam teori strategi, hal penting lainnya adalah means yakni sarana atau sumber daya kekuatan yang dimiliki untuk mengejar tujuan dan sasaran tersebut. Dalam strategi pertahanan negara, sumber daya yang digunakan adalah dengan memanfaatkan sumber daya pertahanan baik militer dan nirmiliter yang mencakup kekuatan sumber daya dan sarana prasarana nasional, nilai-nilai yang dimiliki bangsa, teknologi, serta dana yang dikelola dan didayagunakan. Data yang diperoleh selama penelitian sangat sesuai dengan teori yang ada, bahwa Indonesia telah memanfaatkan segala sarana dan sumber daya yang dimiliki negara dalam kerjasama penanggulangan yang ada. Dalam melakukan kerjasama penanggulangan terorisme tersebut juga tidak dapat dipungkiri bahwa sarana yang dimanfaatkan oleh Indonesia beserta

negara peserta lainnya memanfaatkan kemampuan personel dan juga prasarana dari segi teknologi maupun senjata.

Banyak sekali sarana dan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia yang sudah dimanfaatkan agar program penanggulangan terorisme dapat berjalan maksimal. Dari semua data yang diperoleh, dapat dijelaskan bahwa sarana dan sumber daya yang telah dimanfaatkan oleh Indonesia berasal dari segi militer dan juga non militer. Dari segi militer, Indonesia memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun oleh negara yakni pusat pelatihan counter terrorism yang berada di Sentul, dengan memanfaatkan alutsista (*military equipment*) dan teknologi yang ada dalam latihan bersama tersebut, yang hasilnya telah memberikan peningkatan kemampuan personel dari masing-masing negara, serta hasil dari sharing information yang dilakukan pada latihan bersama tersebut telah memberikan masukan pada masing-masing negara peserta dalam membongkar jaringan terorisme yang ada. Dapat dijelaskan lebih rinci, bahwa penyelenggaraan dalam kegiatan CTx ini didukung oleh TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam joint training, latihan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut melalui 2 mekanisme yakni dengan *table top exercise* yakni strategi yang dilakukan melalui pengetahuan dan informasi dimana hal tersebut memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh personel, sedangkan *practical exercise* adalah strategi yang dilakukan melalui latihan bersama dilakukan di lapangan yang tentu saja memanfaatkan peralatan militer dan teknologi yang ada. Sarana yang disiapkan oleh Indonesia dalam pembekalan dibidang pengetahuan terhadap program penanggulangan terorisme dibuktikan dengan adanya *Training Center* yang dimiliki oleh BNPT yang berada di Kawasan IPSC (*Indonesia Peace and Security Center*) Sentul, Bogor yang sudah digunakan dalam latihan gabungan.

Hal tersebut diterangkan oleh Menteri Pertahanan RI ke 23 periode 2009-2014 (Ir. Purnomo Yusgiantoro M.Sc, M.A, Ph.D) bahwa Indonesia telah memanfaatkan sarana yang telah dibangun oleh negara untuk menunjang latihan dalam kerjasama penanggulangan terorisme ini. Pada latihan

bersama yang pertama yang telah dilakukan pada tahun 2013, Indonesia bersama negara lainnya anggota ADMM plus melakukan latihan bersama di *Training Center* yang ada di Sentul yang merupakan pindahan dari PLATINA di Semarang. Latihan counter terrorism dipimpin oleh Direktur latihan yang juga Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopassus) Mayor Jenderal Agus Sutomo. Sedangkan Wakil Direktur Latihan, dijabat Komandan Pasukan Marinir-2 (Danpasmar-2) Brigadir Jenderal Marinir Buyung Lalana. Dalam latihan ini Alutsista yang digunakan antara lain Helikopter Bell, Helikopter Puma, Helikopter MI-17, kendaraan khusus (Ransus), LCR dan Sea Rider (Akbar, 2013: 7). Meski latihan ini mengikutsertakan prajurit-prajurit Negara tetangga, TNI memiliki kemampuan luar biasa. Tidak kurang pasukan elit dari 18 negara dilibatkan dalam latihan ini. Kesempatan tersebut digunakan Pasukan khusus TNI untuk unjuk kebolehan. Tiga pasukan elit yang diterjunkan adalah Satuan 81 Gultor Kopassus TNI AD, Detasemen Bravo TNI AU dan Detasemen Jala Mangkara TNI AL. Rata-rata satu

prajurit pasukan khusus memiliki kemampuan sepuluh tentara biasa.

Simpulan

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strategi kerjasama di bidang *counter terrorism* melalui ADMM plus pada tahun 2013 dalam meningkatkan kemampuan penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan cara kerjasama pertahanan dimana kerjasama pertahanan tersebut diimplementasikan melalui *joint training* (latihan bersama). ASEAN saat ini sedang mencari pola, bentuk atau mekanisme kerjasama terbaik dan sesuai untuk bisa diimplementasikan guna menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Dalam penelitian ini, telah dibuktikan bahwa strategi kerjasama di bidang *counter terrorism* yang dilakukan melalui ADMM plus dapat meningkatkan kemampuan penanggulangan terorisme di Indonesia, dan hal tersebut telah dirasakan oleh Indonesia dari segi peningkatan kemampuan personel maupun pemanfaatan alutsista. Melalui ADMM plus ini, ASEAN beserta 8 negara major sebagai mitra wicara eksternal ASEAN, telah menciptakan sebuah strategi untuk

menghadapi segala ancaman terorisme yang kian meningkat di kawasan. Latihan bersama itu memiliki materi berupa *table top exercise* dan *practical exercise*. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan rasa saling percaya, dan juga menjaga kestabilan kawasan. Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam kerjasama ini adalah untuk mencapai kepentingan nasional yang dimiliki dengan meningkatkan kemampuan negara dalam hal penanggulangan terorisme dikarenakan ancaman terorisme saat ini kian tinggi, kemudian Indonesia ingin menunjukkan image bahwa kemampuan personel dan *military equipment* yang dimiliki, Indonesia siap dan mampu menghadapi ancaman tersebut, dan konsistensi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya, tujuan dari kerjasama ini dapat dilihat dari mekanisme latihan yang dilakukan yakni tujuan dari adanya *Table Top Exercise* dan *Practical Exercise*. TTX bertujuan untuk mendapatkan wawasan mengenai tantangan, prioritas dan kemampuan *counter terrorism* di kawasan, dan untuk mengembangkan berbagai kesempatan kerjasama *counter terrorism* lainnya. Sementara PE dimaksudkan untuk

mengembangkan kemampuan *counter terrorism* militer negara ADMM Plus lewat pertukaran *best practices* dan demonstrasi teknik, taktik dan prosedur *counter terrorism* antar angkatan bersenjata dalam mendukung proses penegakan hukum atau usaha lain yang dilakukan oleh institusi pemerintah yang memiliki kewenangan. Untuk sarana dan sumber daya yang dipakai dalam kerjasama di bidang penanggulangan terorisme melalui ADMM plus ini yakni dengan memanfaatkan sarana militer mulai dari peralatan, teknologi, dan juga kemampuan masing-masing personel. Alutsista yang digunakan dalam latihan bersama tersebut menggunakan antara lain Helikopter Bell, Helikopter Puma, Helikopter MI-17, kendaraan khusus (Ransus), LCR dan Sea Rider. Selain itu, pasukan yang terlibat dalam latihan adalah Satuan 81 Gultor Kopassus TNI AD, Detasemen Bravo TNI AU dan Detasemen Jala Mangkara TNI AL.

- 1) Kontribusi ADMM plus di bidang *counter terrorism* dalam meningkatkan kemampuan negara pada penanggulangan terorisme terlihat pada masukan yang telah diberikan, yakni antara lain sebagai

referensi bagi mekanisme di ARF atau sebaliknya, memberikan masukan terhadap mekanisme kerjasama lanjutan dalam hal penanggulangan terorisme baik dengan cara latihan bersama maupun kerjasama lainnya, memberikan masukan terhadap penetapan kebijakan mengenai penanggulangan terorisme di dalam negeri, memberikan manfaat terhadap peningkatan kemampuan *soft power* personel baik dari segi kecepatan dan ketepatan dalam penindakan terorisme, dengan adanya *sharing information* dalam latihan bersama, memberikan kontribusi terhadap informasi dan data mengenai kegiatan pencegahan, aksi, dan rehabilitas yang dilakukan masing-masing negara sehingga negara mampu menyetarakan bahkan meningkatkan kualitas kemampuan personel serta peningkatan keefektifan alutsista yang dimiliki oleh negara dalam penanggulangan terorisme.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. (2013). *ADMM plus EWG on CTx 2013 : Urgensi Kerjasama Pertahanan ASEAN dalam Penanggulangan Terorisme*. Majalah WIRA Edisi Khusus 2013.
- Anwar, S. (2014). *Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan*. Jurnal Pertahanan : Diplomasi Pertahanan, Volume 4 No. 2, Agustus 2014.
- Banlaoi, R. (2009). *Counter Terrorism Measures in Southeast Asia : How Effective Are They?* Manila: Yuchengco Center, De La Salle University.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cerami, J., & Halcomb, J. (2001). *A Primer in Strategy Development. A Guide to Strategy*.
- Corcoran, A. J. (2003). *Assessing the Effectiveness of Defence Diplomacy*. Defense Science and Technology Laboratories, 37.
- Fatlolon, C. (2016). *Masalah Terorisme Global*. Yogyakarta: KANISUS
- Forest, J. (2007). *Countering Terrorism And Insurgency In The 21st Century International Perspectives Volume 1 : Strategic and Tactical Consideration*. London: Preager Security International.
- Golose, P. R. (2010). *Deradikalisasi Terorisme : Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Griffiths, M., O'Callaghan, T., & Roach, C. (2008). *International Relations: The Key Concepts Second Editions*. New York: Routledge.
- Gunaratna, R. (2002). *Inside Al Qaeda*. New York: Colombia University Press.
- Hart, L. H. (1991). *The Classic Book on Military Strategy*. London: Meridian Book.
- Hidayat, S. (2014). *Diplomasi Pertahanan Indonesia : Amalgam Militer-Sipil*. Jurnal Pertahanan : Diplomasi Pertahanan, Volume 4 No. 2, Agustus 2014.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Jablonsky, D. (1995). *Why is Strategy Difficult?* Strategic Studies US Army War Collage.
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global Dalam Teori dan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kemenlu RI. (2015). *Rencana Strategis 2015-2019*. Jakarta : Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.
- _____. (2015). *Perdamaian Dan Stabilitas Keamanan : 'Conditio Sine Qua Non' Bagi Masyarakat Asean*. Masyarakat ASEAN Edisi 10 : Maju Bersama Masyarakat ASEAN, Edisi 10, Desember 2015.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kemeterian Pertahanan Republik Indonesia.
- _____. (2014). *Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- _____. (2014). *Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2014*. Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- _____. (2014). *Postur Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- _____. (2014). *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- _____. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kurniawati, D. (2012). *Peran Strategis Kerjasama Intelijen ASEAN Dalam Upaya Pencegahan Serangan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mahnken, T. G., & Maiolo , J. A. (2008). *Strategic Studies a Reader*. New York: Routledge
- Mangindaan, R. (2013, September). *Meningkatkan Peran Diplomasi Pertahanan: Perspektif*. Dipetik Maret 10, 2017, dari Forum Kajian Pertahanan Maritim: <http://www.fkpmaritim.org/>
- Moleong, L. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulloy, G. (2007). *Japan's Defense Diplomacy and Cold Peace in Asia*.

- Asia Journal of Global Studies Vol. I (1).
- Novitasari, I. (2015). *Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menghadapi Internasionalisasi Isu Gerakan Separatis Papua Merdeka tahun 200-2013*. Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Ruslan, R. (2010). *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi, Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim. (2012). *Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan*.
- Slaughter, A. M. (2012). *Adviesraad Internationale Vraagstukken*. 9-10.
- Sinambela, V. (2014). *Kepentingan Indonesia Dalam Konvensi Asean Tentang Pemberantasan Terorisme (Asean Convention On Counter Terrorism)*.
- Soesilowati, S. (2011). *ASEAN's Response to the Challenge of Terrorism*. Volume 24 No. 3 Tahun 2011.
- Steiner, B. (2004). *Diplomacy and International Theory*. UK: Cambridge University Press.
- Sugiarto. (2004). *Teknik Sampling*. Jakarta: Gramedia.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yuniarti, A. (2010). *Implementasi Mekanisme Regional ASEAN dalam Penanggulangan Masalah Terorisme di Asia Tenggara*.